

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial keluarga kurang mampu terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak terbentuk melalui proses dialektika sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses memperlihatkan bahwa pemaknaan keluarga terhadap KJP tidak terbentuk secara sederhana sebagai bantuan pendidikan semata, melainkan berkembang melalui pengalaman hidup keluarga, interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat, serta struktur kebijakan yang mengatur program KJP

Pada tahap eksternalisasi, keluarga penerima mengekspresikan pengalaman mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas serta ketidakpastian pendapatan rumah tangga. Dalam situasi ekonomi yang mendesak, keberadaan KJP dipahami sebagai bantuan yang mampu meringankan beban biaya pendidikan anak sekaligus memberikan rasa aman bagi keluarga agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, pengalaman ekonomi keluarga yang penuh keterbatasan juga memengaruhi cara mereka memaknai bantuan KJP. Sehingga, KJP tidak hanya dipahami sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak.

Pada tahap objektivasi, pengalaman individual keluarga penerima berkembang menjadi realitas sosial yang diakui secara kolektif dalam lingkungan keluarga penerima. Praktik penggunaan KJP di luar ketentuan pendidikan, seperti pencairan dana melalui pihak ketiga, pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan rumah tangga, penjualan kembali bantuan pangan murah, hingga praktik pegadaian kartu

KJP, tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual yang terpisah. Melalui interaksi sosial antar keluarga penerima, tetangga, serta aktor ekonomi di lingkungan sekitar, praktik tersebut mengalami proses pelebagaan dan legitimasi sosial. Penerima KJP yang lebih lama sering kali menjadi sumber pengetahuan bagi penerima baru mengenai cara menggunakan bantuan tersebut. Selain itu, keberadaan aktor ekonomi seperti pedagang yang menerima transaksi menggunakan KJP maupun pihak yang menyediakan jasa pencairan dana turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada tahap internalisasi, realitas sosial tersebut kemudian diserap kembali oleh keluarga penerima dan menjadi bagian dari cara mereka memahami penggunaan KJP dalam kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik yang berkembang di lingkungan sosial tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan semata, tetapi dipahami sebagai strategi adaptasi yang rasional dalam menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, keluarga penerima tidak dapat dipahami hanya sebagai aktor yang tidak mematuhi aturan kebijakan, melainkan sebagai subjek sosial yang secara reflektif menafsirkan kebijakan publik berdasarkan pengalaman hidup dan kebutuhan sosial ekonomi yang mereka hadapi.

Dari keseluruhan proses dialektika konstruksi sosial, penelitian ini menemukan adanya pemaknaan kolektif di lingkungan keluarga penerima KJP. Di satu sisi, KJP dipahami sebagai hak dimana keluarga kurang mampu berhak dalam menggunakan KJP sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Di sisi lain, KJP juga dimaknai sebagai sumber penghasilan tambahan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam kondisi ketika kebutuhan rumah tangga lebih mendesak dibandingkan kebutuhan pendidikan yang tidak selalu bersifat rutin setiap bulan, bantuan tersebut diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara makna normatif KJP sebagai kebijakan pendidikan yang dirancang oleh pemerintah dengan makna

subjektif yang dibentuk oleh keluarga penerima dalam praktik kehidupan sehari-hari. Secara normatif, KJP dirancang sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Namun dalam realitas sosial, bantuan KJP juga dikonstruksikan sebagai bagian dari strategi ekonomi keluarga dalam menghadapi tekanan kebutuhan hidup di lingkungan perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak selalu berjalan secara linear sesuai dengan tujuan yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, kebijakan publik dapat mengalami proses reinterpretasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, jaringan relasi sosial di lingkungan masyarakat, serta dinamika kehidupan sehari-hari penerima bantuan. Oleh karena itu, pemanfaatan KJP oleh keluarga penerima tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penyimpangan terhadap aturan kebijakan, tetapi sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara pengalaman hidup keluarga, lingkungan sosial penerima bantuan, dan struktur kebijakan yang mengatur program tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian tentang konstruksi sosial keluarga kurang mampu terhadap Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam keberlanjutan pendidikan anak di Kelurahan Pekayon, penelitian ini menghasilkan sejumlah saran yang memiliki manfaat baik secara akademik maupun praktis, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan Program KJP oleh Pemerintah DKI Jakarta.

5.2.1 Saran Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam bidang sosiologi kebijakan sosial, sosiologi

pendidikan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman keluarga penerima program bantuan pendidikan serta Pendekatan teori lain juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk memperdalam analisis.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran praktis yang relevan dengan kondisi keluarga penerima KJP di lapangan

1. Pertama, diperlukan edukasi mengenai penggunaan KJP dengan pendekatan yang empatik dan persuasif, bukan semata-mata berbasis pengawasan dan larangan. Pendekatan edukatif yang dialogis diharapkan dapat membantu keluarga memahami tujuan program sekaligus merasa didampingi.
2. Kedua, keluarga penerima perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai ketentuan, batasan, serta peruntukan penggunaan bantuan sosial pendidikan agar pemanfaatannya tetap selaras dengan tujuan program dan tidak mengurangi pemenuhan hak pendidikan anak.
3. Ketiga, perlu difasilitasi ruang dialog yang terbuka dan partisipatif antara keluarga penerima KJP, pihak sekolah, serta pendamping sosial yang bisa dibentuk oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ruang dialog ini penting agar keluarga dapat menyampaikan pengalaman, kendala, dan kebutuhan nyata yang mereka hadapi, sehingga pelaksanaan program dapat dipahami secara lebih manusiawi.
4. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat sosialisasi program KJP secara langsung kepada keluarga penerima,

baik mengenai tujuan, mekanisme, maupun batasan penggunaan bantuan, agar pemahaman masyarakat terhadap program semakin jelas. Keempat, Pemerintah DKI dapat mentoring penggunaan KJP dengan membuat *website* untuk laporan keuangan atau laporan pemakaian KJP hal ini agar KJP dapat digunakan dengan semestinya.

5. Kelima, Pemerintah DKI Jakarta dapat membuat program edukasi dan pelatihan keterampilan bagi orang tua dari keluarga penerima KJP sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya ini diharapkan dapat membantu memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga dana KJP dapat lebih optimal dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

